

POLA KOMUNIKASI DALAM PENANGGULANGAN KONFLIK

Oleh: Arifuddin Tike

Fakultas Dakwah dan Komunikasi

UIN Alauddin Makassar

Abstract:

Conflict is a social phenomenon that is present in social life, so that conflict is inherently means conflict will always exist in every space and time, anywhere and anytime. In this view, society is an arena of conflict or an arena of conflict and integration that is always going on. Therefore, conflict and social integration is a symptom that always fill every social life. Things that encourage the emergence of conflict and integration is the existence of similarities and differences of social interests . In every social life there is not a single human having the exact similarity, whether of ethnicity, interests, will, will, purpose and so on. From each conflict there are some that can be resolved, but some can not be resolved resulting in some acts of violence. Violence is a symptom that can not overcome the root of the conflict, causing violence from the smallest model of violence to war. Good communication is needed in problem solving and is important in achieving the success of a life in the community. Conflicts can be resolved well if communication is harmoniously established between the community, both verbal and non verbal. Effective communication patterns are one of the most important conditions in relation to resolving conflicts among conflict resolution societies that arise in marriage life especially in different national marriages, the subject of education because women and men are distinctly different in terms of communication. This is what then makes researchers want to know more deeply about how the picture polakomunikasi in conflict resolution

Keywords:

Patterns, Communication, and Conflict.

PENDAHULUAN

Secara sosiologis, konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih (bisa juga kelompok) dimana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkannya atau membuatnya tidak berdaya. Tidak satu masyarakat pun yang tidak pernah mengalami konflik antar anggotanya atau dengan kelompok masyarakat lainnya, konflik hanya akan hilang bersamaan dengan hilangnya masyarakat itu sendiri.

Konflik dilatarbelakangi oleh perbedaan ciri-ciri yang dibawa individu dalam suatu interaksi. Perbedaan-perbedaan tersebut diantaranya perbedaan ciri fisik, kepandaian, pengetahuan, adat istiadat, keyakinan, agama dan lain sebagainya. Dengan dibawasertanya ciri-ciri individual dalam interaksi sosial, konflik merupakan situasi yang wajar dalam setiap masyarakat..

Konflik bertentangan dengan integrasi. Konflik dan integrasi berjalan sebagai sebuah siklus di masyarakat. Konflik yang terkontrol akan menghasilkan integrasi. Sebaliknya, integrasi yang tidak sempurna dapat menciptakan konflik. Antara konflik dan integrasi adalah dua sisi yang selalu hadir dalam setiap kehidupan masyarakat, kapan dan dimana saja.

Persoalan konflik termasuk permasalahan yang menyangkut kepentingan masyarakat (keamanan), dimana peran pemerintah dalam merespon persoalan konflik adalah sesuatu yang sangat penting. Kemampuan pemerintah dalam menyelesaikan persoalan di tengah masyarakat menjadi titik tekan kredibilitas pemerintah. Maka dari itu kehadiran pemerintah mutlak diperlukan, baik konflik itu terjadi antara suku, etnis, agama, persoalan remaja, ekonomi maupun masalah keretakan rumah tangga di suatu masyarakat tertentu.

Salah satu cara mengatasi konflik adalah dengan komunikasi. Komunikasi tidak bisa hanya dipandang sebagai pelengkap dalam interaksi sosial manusia. Bahkan lebih dari itu bahwa komunikasi menjadi elemen penting dalam setiap pola tindakan individu dalam kaitannya sebagai makhluk sosial. Komunikasi berfungsi meningkatkan hubungan kemanusiaan di antara pihak-pihak yang berkomunikasi.¹ Melalui komunikasi setiap manusia dapat membangun hubungan yang baik sehingga menghindari dan mengatasi terjadinya konflik dalam masyarakat.

Disisi lain komunikasi juga dapat memicu terjadinya konflik. Perlu diingat bahwa komunikasi adalah bagian mutlak dari proses budaya yang adab. Komunikasi merupakan proses penciptaan kebersamaan dalam makna. Dalam masyarakat yang kurang memahami nilai-nilai demokratis, sulit terjadi komunikasi yang wajar karena semua makna menjadi hak tafsir si penguasa.

Konflik horizontal (konflik sosial, etnis, ras, dan agama antar warga), disebabkan oleh kegagalan dalam mengelola pesan-pesan verbal dan non-verbal. Masyarakat pendatang cenderung menggunakan bahasa yang berbeda dengan penduduk lokal meskipun telah ada kesepakatan (tidak tertulis) untuk menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu bangsa, akan tetapi logat atau aksen yang digunakan oleh masing-masing orang yang berinteraksi masih mengikuti logat atau aksen dari sukunya masing-masing. Kondisi ini menyebabkan sulitnya menerima pesan yang disampaikan, lalu terjadi kesalahan interpretasi, hingga akhirnya memicu konflik. Kegagalan pengelolaan pesan tidak hanya terjadi secara verbal (lisan), pesan non-verbal juga ikut menyumbang terjadinya konflik antar warga.

Walaupun komunikasi dianggap sebagai salah satu pemicu konflik, tetapi disisi lain komunikasi dapat pula dijadikan sebagai alat untuk mengatasi konflik, sehingga komunikasi sangat dibutuhkan dalam kehidupan masyarakat untuk mengatasi berbagai konflik.

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka timbul permasalahan. Bagaimana pola komunikasi dalam mengatasi konflik di masyarakat?

PEMBAHASAN

Konsepsi Dasar Konflik dan Komunikasi

a. Konflik

Terdapat banyak definisi mengenai konflik yang bisa jadi disebabkan oleh perbedaan pandangan dan setting dimana konflik terjadi. Konflik merupakan suatu bentuk interaksi diantara pihak yang berbeda dalam kepentingan, persepsi dan tujuan. Konflik adalah perbedaan pendapat antara dua atau lebih banyak anggota organisasi atau kelompok, karena harus membagi sumber daya yang langka, atau aktivitas kerja dan atau karena mereka mempunyai status, tujuan, penelitian, atau pandangan yang berbeda. Para anggota organisasi atau sub-unit yang sedang berselisih akan berusaha agar kepentingan atau pandangan mereka mengungguli yang lainnya.²

Pengertian tersebut mengandung pemahaman bahwa konflik merupakan sebuah situasi dimana dua orang atau lebih menginginkan tujuan-tujuan yang menurut persepsi mereka dapat dicapai oleh salah seorang diantara mereka, tetapi hal itu tidak mungkin dicapai oleh kedua belah pihak.

Konflik adalah perilaku anggota organisasi yang dicurahkan untuk berposisi terhadap anggota yang lain, prosesnya dimulai jika satu pihak merasa bahwa pihak lain telah menghalangi atau akan menghalangi sesuatu yang ada kaitan dengan dirinya atau hanya jika ada kegiatan yang tidak cocok.

Menurut lawang konflik diartikan sebagai perjuangan untuk memperoleh hal-hal yang langka seperti nilai, status, kekuasaan dan sebagainya dimana tujuan mereka berkonflik itu tidak hanya memperoleh keuntungan tetapi juga untuk menundukkan pesaingnya. Konflik dapat diartikan sebagai benturan kekuatan dan kepentingan antara satu kelompok dengan kelompok lain dalam proses perebutan sumber2 kemasyarakatan (ekonomi, politik, sosial dan budaya) yang relatif terbatas.³

Menurut Leopod Von Wiese Yang dikutip Oleh J Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto menyatakan bahwa konflik adalah suatu proses sosial dimana orang perorangan atau kelompok manusia berusaha untuk memenuhi apa yang menjadi tujuannya dengan jalan menentang pihak lain disertai dengan ancaman dan kekerasan.⁴ Dari pengertian konflik tersebut, dapat dikatakan bahwa konflik merupakan proses sosial yang dilakukan oleh sekelompok manusia yang berusaha untuk memenuhi apa yang menjadi keinginannya yang disertai dengan kekerasan.

Konflik merupakan suatu kondisi yang terjadi ketika dua pihak atau lebih menganggap ada perbedaan posisi yang tidak selaras, tidak cukup sumber dan tindakan salah satu pihak menghalangi, atau mencampuri atau dalam beberapa hal membuat tujuan pihak lain kurang berhasil. Dari pengertian konflik tersebut, maka konflik merupakan kondisi yang terjadi akibat perbedaan posisi yang tidak selaras, adanya pihak yang menghalangi serta ikut campur yang mengakibatkan tujuanpihak lain tidak terpenuhi.

Dari berbagai pengertian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa konflik adalah percekocan, perselisihan dan pertentangan yang terjadi antar anggota atau masyarakat dengan tujuan untuk mencapai sesuatu yang diinginkan dengan cara saling menantang dengan ancaman kekerasan. konflik sosial adalah salah satu bentuk interaksi sosial antara satu pihak dengan pihak lain didalam masyarakat yang ditandai dengan adanya sikap saling mengancam, menekan, hingga saling menghancurkan. Konflik sosial sesungguhnya merupakan suatu proses bertemunya dua pihak atau lebih yang mempunyai kepentingan yang relative sama terhadap hal yang sifatnya terbatas Dalam bentuknya yang ekstrem, konflik itu dilangsungkan tidak hanya sekedar untuk mempertahankan hidup dan eksistensi, akan tetapi juga bertujuan sampai ketaraf pembinasaan eksistensi orang atau kelompok lain yang dipandang sebagai lawan atau saingannya.

2. Konsep Komunikasi

Kata komunikasi dalam bahasa inggris disebut *Communication* yang mempunyai makna hubungan , berita, pengumuman atau pemberitahua.⁵ Dalam bahasa latin komunikasi disebut *Communication* atau *communis* yang berarti sama, sama maknanya, atau mempunyai kesamaan pandangan. Dalam pengertian tersebut dapat dipahami bahwa komunikasi dapat berlangsung dengan baik apabila ada kesamaan makna atau pandangan antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya.⁶ Untuk mencapai kesamaan makna dalam pembicaraan atau percakapan, maka keduanya harus sama-sama mengetahui bahasa yang dipakai dalam proses komunikasi, meskipun keduanya sama-sama memakai bahasa yang sama belum tentu mempunyai kesamaan makna tentang isi komunikasi. Yang paling penting dalam komunikasi adalah terjadinya hubungan manusiawi antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya, baik secara individu maupun secara kelompok.⁷

Pengertian komunikasi di atas baru pengertian secara umum, karena baru sampai apada tahap memahami isi pesan. Jadi sifatnya informatif. Bila dilihat lebih dalam, pengertian komunikasi dapat dibagi dua yaitu pengertian komunikasi secara umum dan pengertian komunikasi secara paradigmatic.

Pengertian komunikasi secara umum dapat digambarkan bahwa: dalam kehidupan sosial, proses komunikasi tidak pernah berhenti sejak dari bangun tidur sampai tidur kembali. Hal ini merupakan konsekwensi logis dari kehidupan manusia yang senantiasa mengandalkan hubungan interaksi dengan sesamanya dan melahirkan kehidupan manusia yang bersifat kemasyarakatan, sistem kemasyarakatan bisa terwujud dengan baik apabila terjadi interaksi. Interaksi bisa terjadi apabila berlangsung komunikasi.⁸ Sedang pengertian Komunikasi secara paradigmatic banyak didefinisikan oleh para ahli. Secara terminologi, komunikasi dapat didefinisikan sebagai suatu mekanisme mengadakan hubungan antara sesama manusia dengan mrengembangkan semua lambang-lambang dan pikiran bersama dengan arti yang menyertainya.⁹

Pengertian komunikasi tersebut mengisyaratkan bahwa dalam komunikasi antara seseorang dengan yang lainnya terjadi hubungan atau interaksi. Dan hubungan tersebut

secara bersama-sama mencurahkan seluruh pikirannya melalui lambang-lambang yang berarti. Carel I. Hovland sebagaimana yang dikutip oleh Onong Oechiana Efendy mengemukakan bahwa, komunikasi adalah upaya sistematis untuk merumuskan secara tegas asas-asas penyampaian informasi serta pembentukan pendapat umum.¹⁰

Definisi I Hovland tersebut di atas, menunjukkan bahwa yang dijadikan obyek studi komunikasi bukan saja penyampaian informasi, melainkan juga pembentukan pendapat umum dan pembentukan sikap. Kedua hal ini sangat penting dalam kehidupan sosial dan kehidupan politik. Perlu diketahui bahwa pendapat, perilaku, dan sikap seseorang dapat saja berubah manakala komunikasi yang disampaikan kepada seseorang itu komunikatif. Karena itu maka dalam komunikasi, antara komunikator dengan komunikannya harus sama-sama memahami makna yang terkandung dalam pesan atau informasi yang disampainya.

Edwar Depari memberi pengertian komunikasi sebagai penyampaian gagasan, harapan, dan pesan yang disampaikan melalui lambang-lambang tertentu yang mengandung arti, dilakukan oleh penyampai pesan kepada penerima pesan dengan maksud mencapai kebersamaan. Lambang-lambang yang dipergunakan dalam penyampaian pesan adalah lambang *verbal simbol* dan *non verbal simbol*.¹¹

Definisi di atas menunjukkan bahwa dalam komunikasi minimal unsur komunikasi yang harus ada yaitu : penyampai pesan, gagasan, atau isi pesan dan penerima pesan. Komunikasi adalah jembatan untuk menyampaikan informasi dari satu pihak-ke pihak lain, dari komunikator kepada komunikan atau dari Tuhan kepada hamba-Nya dan dari sesama umat manusia, sehingga pengirim pesan tersebut dapat menyampaikan informasi atau ajaran kepada komunikannya. Dengan demikian komunikasi adalah suatu transaksi, proses simbolik yang menghendaki orang-orang mengatur lingkungannya dengan membangun hubungan antar manusia melalau pertukaran informasi untuk menguatkan sikap dan tingkah laku orang lain serta berusaha mengubah sikap dan tingkah laku itu.¹²

Berdasar dari pengeritian yang dikemukakan di atas, maka dapat diketahui bahwa unsur-unsur komunikasi meliputi: (1). Komunikator. (2). Pesan, (3). Media, (4).Komunikan atau khalayak, (5).Efek, (6) tujuan, (7) lingkungan. Dengan demikian komunikasi adalah proses penyampaian pesan oleh komunikator kepada komunikan/ khalayak melalui media yang menimbulkan efek tertentu.

Ketujuh unsur komunikasi tersebut di atas merupakan satu kesatuan dalam membentuk hubungan manusia dengan hubungan sosialnya. Proses komunikasi pada hakikatnya adalah proses penyampaian pikiran atau perasaan oleh seorang komunikator kepada komunikannya. Pikiran bisa berupa gagasan, informasi, opini, ajaran dan lain-lain.

Secara kodrati, manusia adalah makhluk sosial yang selalu mengadakan hubungan dengan yang lainnya. Dalam arti manusia memerlukan manusia lainnya ataupun kelompok yang satu memerlukan kelompok yang lainnya, sehingga kehidupan manusia baik perseorangan, maupun kelompok selalu mengadakan hubungan. Hubungan tersebut bisa berlangsung aktif bila selalu mengadakan komunikasi.

Pola Komunikasi Dalam Penanggulangan Konflik.

Pola komunikasi yaitu suatu sistem yang terdiri atas berbagai komponen yang berhubungan satu sama lain untuk mencapai tujuan dari suatu tujuan tertentu. Pola adalah bentuk atau model yang biasa di pakai untuk membuat atau untuk menghasilkan suatu atau bagian dari sesuatu, khususnya jika yang di timbulkan cukup mencapai suatu sejenis untuk pola dasar yang dapat di tunjukan atau terlihat.¹³

Pola Komunikasi adalah proses yang dirancang untuk mewakili kenyataan keterpautannya unsur-unsur yang di cakup beserta keberlangsungannya, guna memudahkan pemikiran secara sistematis dan logis. Komunikasi melibatkan sejumlah orang dimana seorang menyatakan sesuatu kepada orang lain, jadi yang terlibat dalam Komunikasi itu adalah manusia itu. Komunikasi berawal dari gagasan yang ada pada seseorang, gagasan itu di olah menjadi pesan dan dikirimkan melalui media tertentu kepada orang lain sebagai penerima. Penerima pesan, dan sudah mengerti pesannya kepada pengirim pesan. Dengan menerima tanggapan dari si penerima pesan itu, pengirim pesan dapat menilai efektifitas pesan yang di kirimkannya. Berdasarkan tanggapan itu, pengirim dapat mengetahui apakah pesannya di mengerti dan sejauh mana pesannya di mengerti oleh orang yang di kirim pesan itu.

Sisi lain untuk mengatasi konflik, maka yang sangat dibutuhkan adalah pemahaman tentang faktor-faktor penyebab terjadinya konflik. Konflik merupakan suatu bentuk interaksi diantara beberapa pihak yang berbeda dalam kepentingan, persepsi dan tujuan. Konflik adalah perbedaan pendapat antara dua atau lebih banyak anggota organisasi atau kelompok, karena harus membagi sumber daya yang langka, atau aktivitas kerja dan atau karena mereka mempunyai status, tujuan, penelitian, atau pandangan yang berbeda. Para anggota organisasi atau sub-unit yang sedang berselisih akan berusaha agar kepentingan atau pandangan mereka mengungguli yang lainnya.

Konflik merupakan sebuah situasi dimana dua orang atau lebih menginginkan tujuan-tujuan yang menurut persepsi mereka dapat dicapai oleh salah seorang diantara mereka, tetapi hal itu tidak mungkin dicapai oleh kedua belah pihak. Konflik adalah perilaku anggota organisasi yang dicurahkan untuk berposisi terhadap anggota yang lain, prosesnya dimulai jika satu pihak merasa bahwa pihak lain telah menghalangi atau akan menghalangi sesuatu yang ada kaitan dengan dirinya atau hanya jika ada kegiatan yang tidak cocok.

Para sosiolog berpendapat bahwa akar dari timbulnya konflik yaitu adanya hubungan sosial, ekonomi, politik yang akhirnya adalah perebutan atas sumber-sumber kepemilikan, status sosial dan kekuasaan yang jumlah ketersediaannya sangat terbatas dengan pembagian yang tidak merata di masyarakat.¹⁴ Ketidak merataan pembagian aset-aset sosial di dalam masyarakat tersebut dianggap sebagai bentuk ketimpangan. Ketimpangan pembagian ini menimbulkan pihak-pihak tertentu berjuang untuk mendapatkannya atau menambahnya bagi yang perolehan aset sosial relatif sedikit atau kecil. Sementara pihak yang telah mendapatkan pembagian aset sosial tersebut berusaha untuk mempertahankan dan bisa juga

menambahinya. Pihak yang cenderung mempertahankan dan menambahinya disebut sebagai status quo dan pihak yang berusaha mendapatkannya disebut sebagai status *need*. Adapun penyebab konflik adalah:

- a. Perbedaan individu yang meliputi perbedaan pendirian dan perasaan.

Setiap manusia adalah individu yang unik. Artinya, setiap orang memiliki pendirian dan perasaan yang berbeda-beda satu dengan lainnya. Perbedaan pendirian dan perasaan akan sesuatu hal atau lingkungan yang nyata ini dapat menjadi faktor penyebab konflik sosial, sebab dalam menjalani hubungan sosial, seseorang tidak selalu sejalan dengan kelompoknya. Misalnya, ketika berlangsung pentas musik di lingkungan pemukiman, tentu perasaan setiap warganya akan berbeda-beda. Ada yang merasa terganggu karena berisik, tetapi ada pula yang merasa terhibur.

- b. Perbedaan latar belakang kebudayaan sehingga membentuk pribadi-pribadi yang berbeda.

Secara sosiologis masyarakat sedikit banyaknya akan terpengaruh dengan pola-pola pemikiran dan pendirian kelompoknya. Pemikiran dan pendirian yang berbeda itu pada akhirnya akan menghasilkan perbedaan individu yang dapat memicu konflik.

Masyarakat Indonesia memiliki multi etnis yang berada di Nusantara, seperti etnis, Sunda, Batak, Dayak, Bugis-Makassar, Mandar, Tanah Toraja, Manado, Papua, Minangkabau, dan lain-lain sebagainya. Perbedaan latar belakang etnis dan budaya tersebut membentuk kebudayaan yang berbeda-beda, sehingga apabila kelompok-kelompok etnis tersebut tidak terkelola dengan baik akan menjadi penyebab konflik.

- c. Perbedaan kepentingan antara individu atau kelompok.

Manusia memiliki perasaan, pendirian maupun latar belakang kebudayaan yang berbeda. Oleh sebab itu, dalam waktu yang bersamaan, masing-masing orang atau kelompok memiliki kepentingan yang berbeda-beda. Kadang-kadang orang dapat melakukan hal yang sama, tetapi untuk tujuan yang berbeda-beda.

- d. Perubahan-perubahan nilai yang cepat dan mendadak dalam masyarakat.

Perubahan adalah sesuatu yang lazim dan wajar terjadi, tetapi jika perubahan itu berlangsung cepat atau bahkan mendadak, perubahan tersebut dapat memicu terjadinya konflik sosial. Misalnya, pada masyarakat pedesaan yang mengalami proses industrialisasi yang mendadak akan memunculkan konflik sosial sebab nilai-nilai lama pada masyarakat tradisional yang biasanya bercorak pertanian secara cepat berubah menjadi nilai-nilai masyarakat industri. Nilai-nilai yang berubah itu seperti nilai kegotongroyongan berganti menjadi nilai kontrak kerja dengan upah yang disesuaikan menurut jenis pekerjaannya. Hubungan kekerabatan bergeser menjadi hubungan struktural yang disusun dalam organisasi formal perusahaan. Nilai-nilai kebersamaan berubah menjadi individualis dan nilai-nilai tentang pemanfaatan waktu yang cenderung tidak ketat berubah menjadi pembagian waktu yang tegas seperti jadwal kerja dan istirahat dalam dunia industri. Perubahan-perubahan ini, jika terjadi seara cepat atau mendadak, akan membuat kegoncangan

proses-proses sosial di masyarakat, bahkan akan terjadi upaya penolakan terhadap semua bentuk perubahan karena dianggap mengacaukan tatanan kehidupan masyarakat yang telah ada.

Adapaun Pola Komunikasi Dalam Penanggulangan Konflik

a. Dialog.

Dialog adalah salah satu cara yang digunakan oleh Pemerintah dan tokoh-tokoh masyarakat untuk menyampaikan pendidikan perdamaian kepada masyarakat yang mengalami konflik. Dengan cara ini, Pemerintah dan Tokoh masyarakat mempertemukan orang-orang yang mengalami konflik dan kemudian secara bersama-sama berdiskusi untuk menemukan dan mencapai tujuan bersama mereka.

Apabila ada masyarakat yang mengalami Konflik baik pada anak-anak Muda maupun Masyarakat pada umumnya, Maka langkah perama yang dilakukan adalah mengadakan dialog dengan kedua belah pihak sehingga mencapai Kesepakatan dan tidak ada lagi gesekan antara masyarakat yang konflik tersebut.

b. Meningkatkan Kemandirian Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain, pemberdayaan adalah memampukan dan memandirikan masyarakat. Dalam upaya memberdayakan masyarakat tersebut dapat dilihat dari tiga sisi, yaitu :

Pertama, menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*enabling*). Disini titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia, setiap masyarakat, memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Artinya, tidak ada masyarakat yang sama sekali tanpa daya, karena jika demikian akan sudah punah. Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya itu, dengan mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya.

Kedua, memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat (*empowering*). Dalam rangka ini diperlukan langkah-langkah lebih positif, selain dari hanya menciptakan iklim dan suasana. Perkuatan ini meliputi langkah-langkah nyata, dan menyangkut penyediaan berbagai masukan (input), serta pembukaan akses ke dalam berbagai peluang (*opportunities*) yang akan membuat masyarakat menjadi berdaya.

Dalam rangka pemberdayaan ini, upaya yang amat pokok adalah peningkatan taraf pemberdayaan, dan derajat kesehatan, serta akses ke dalam sumber-sumber kemajuan ekonomi seperti modal, teknologi, informasi, lapangan kerja, dan pasar. Masukan berupa pemberdayaan ini menyangkut pembangunan prasarana dan sarana dasar fisik, seperti irigasi, jalan, listrik, maupun sosial seperti sekolah dan fasilitas pelayanan kesehatan, yang dapat dijangkau oleh masyarakat pada lapisan paling bawah, serta ketersediaan lembaga-lembaga pendanaan, pelatihan, dan pemasaran di perdesaan, dimana terkonsentrasi penduduk yang keberdayaannya amat kurang. Untuk itu, perlu ada program khusus bagi masyarakat yang

kurang berdaya, karena program-program umum yang berlaku tidak selalu dapat menyentuh lapisan masyarakat ini. Pemberdayaan bukan hanya meliputi penguatan individu anggota masyarakat, tetapi juga pranata-pranatanya. Menanamkan nilai-nilai budaya modern, seperti kerja keras, hemat, keterbukaan, dan kebertanggungjawaban adalah bagian pokok dari upaya pemberdayaan ini.

Demikian pula pembaharuan institusi-institusi sosial dan pengintegrasian ke dalam kegiatan pembangunan serta peranan masyarakat di dalamnya. Yang terpenting disini adalah peningkatan partisipasi rakyat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut diri dan masyarakatnya. Jadi esensi pemberdayaan bukan hanya meliputi penguatan individu anggota masyarakat tetapi juga termasuk penguatan pranata-pranatanya.

Ketiga, memberdayakan mengandung pula arti melindungi. Dalam proses pemberdayaan, harus dicegah yang lemah menjadi bertambah lemah, oleh karena kekurangan berdaya dalam menghadapi yang kuat. Oleh karena itu, perlindungan dan pemihakan kepada yang lemah amat mendasar sifatnya dalam konsep pemberdayaan masyarakat. Melindungi tidak berarti mengisolasi atau menutupi dari interaksi, karena hal itu justru akan mengerdilkan yang kecil dan melunglaikan yang lemah. Melindungi harus dilihat sebagai upaya untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang, serta eksploitasi yang kuat atas yang lemah. Pemberdayaan masyarakat bukan membuat masyarakat menjadi makin tergantung pada berbagai program pemberian (*charity*). Pendekatan utama dalam konsep pemberdayaan adalah bahwa masyarakat tidak dijadikan objek dari berbagai proyek pembangunan, tetapi merupakan subjek dari upaya pembangunannya sendiri.

c. Peran Pemerintah

Setiap individu dalam masyarakat memiliki sumbangsih penting dalam sistem masyarakat setempat. Individu tersebut kemudian membentuk sub sistem sebagai fondasi dari sistem yang ada. Individu dalam masyarakat tentunya memiliki peran yang berbeda-beda antar satu sama lain tergantung dari tuntutan sistem yang memaksa individu tersebut bertindak dan menunjukkan peran. Dalam kehidupan manusia dan hubungannya dalam kelompok tertentu sering kali dibarengi dengan tindakan interaksi yang berpola, baik resmi maupun yang tidak resmi. Sistem pola resmi yang dianut warga suatu masyarakat untuk berinteraksi dalam sosiologi dan antropologi disebut pranata.

Koentjaraningrat menegaskan orang yang bertindak dalam pranata tersebut biasanya menganggap dirinya menempati suatu kedudukan sosial tertentu, tindakan tersebut dibentuk oleh norma-norma yang mengatur. Kedudukan (status) menjadi bagian penting dalam setiap upaya untuk menganalisa masyarakat. Tingkah laku seseorang yang memainkan suatu kedudukan tertentu itulah yang disebut sebagai peranan sosial.¹⁵

Peranan berarti tidak bisa dipisahkan dari kedudukan, eratny kaitan bagi keduanya. Status tertentu akan membutuhkan peran tertentu. Semakin berat peran yang dimainkan maka semakin tinggi pula statusnya dalam masyarakat. Dan sebaliknya bila semakin minim peran yang dilakukan maka semakin rendah pula kedudukan atau statusnya dalam masyarakat.

Menurut Robert M. Z. Lawang , peran diartikan sebagai suatu pola perilaku yang diharapkan dari seseorang yang memiliki status atau posisi tertentu dalam organisasi.¹⁶

Peranan terkadang pula diikuti oleh tuntutan masyarakat yang telah memberikan kepercayaan kepada individu yang menempati status tertentu. Pengharapan masyarakat pada status tertentu langsung maupun tidak memberikan beban bagi pelaksana peran yang dimaksud. Mengutip J.J Rosseau dengan teori kontrak sosialnya. Tugas dari peran yang diemban oleh individu merupakan hasil kontrak dengan masyarakat yang telah memberikan wewenang itu dengan kontrak yang telah disepakati melalui mekanisme yang telah disepakati pula. Oleh karena itu, perlu dipahami bagaimanakah masyarakat menentukan harapan-harapannya terhadap para pemegang peran tersebut.

Sesuai dengan UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah dan Dalam Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 2005 tentang Kelurahan dikatakan bahwa Pemerintah kelurahan terdiri dari Kepala Kelurahan (lurah) dan perangkat kelurahan. Sedangkan perangkat kelurahan terdiri dari sekretaris kelurahan dan kepala-kepala lingkungan yang dalam susunan organisasi dan tata kerjanya diatur dengan peraturan daerah dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri

Kepala Kelurahan (Lurah) adalah pegawai negeri sipil yang diangkat oleh Bupati/Walikota atas nama Gubernur dengan syarat yaitu pendidikan minimal sekolah lanjutan pertama atau yang berpengalaman/berpengalaman sederajat dengan itu. Sekretaris Kelurahan adalah unsur staf yang membentuk usaha kelurahan dalam menjalankan tugas dan wewenang pemerintahan kelurahan. Sekretaris kelurahan terdiri dari sekretaris kelurahan dan kepala-kepala urusan. Untuk memperlancar jalannya pemerintahan di kelurahan maka dapat dibentuk lingkungan yang dikepalai oleh kepala lingkungan.

Kepala kelurahan sebagai pemegang utama dibidang pembangunan maka ia juga dapat dibantu oleh satu lembaga masyarakat yang dulunya dikenal dengan LKMD kini berubah menjadi lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) yang merupakan salah satu mitra pemerintah kelurahan dalam kaitan dengan pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan A.W. Wijaya. Menurut pasal 1 : 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 73 tahun 2005 mengemukakan bahwa Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat kerja Kabupaten/Kota dalam wilayah kerja Kecamatan.

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang Dikemukakan di atas, penelitian ini dapat Disimpulkan sebagai berikut: Sebab terjadinya konflik Pada masyarakat adalah faktor perbedaan individu, faktor kepentingan, faktor budaya, dan perubahan nilai-nilai yang terjadi dimasyarakat akibat terjadinya asimilasi penduduk dengan penduduk pendatang. Langkah yang dilakukan dalam penanganan konflik adalah meningkatkan dialog diantara masyarakat yang mengalami konflik, baik yang berkaitan dengan skil keterampilan dalam mengelola konflik, maupun cara menjadi fasilitator dalam menjembatani konflik yang terjadi di masyarakat. Selain itu

mendorong kemandirian masyarakat untuk menyelesaikan konflik, dan yang terakhir adalah keterlibatan pemerintah dalam memfasilitasi komunikasi diantara masyarakat yang terlibat dengan konflik.

Endnotes

- ¹Hafied Cangara, *Pengantar Ilmu Komunikasi*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2011), h. 61
- ² Selengkapnya dapat dilihat Robert lawang, *Buku Materi Pokok Pengantar Sosiologi*, (Jakarta:universitas terbuka 1994).hal.52
- ³ Robert lawang, h..53
- ⁴ J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto, *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), hal 68.
- ⁵ M. Echols dan Hassan Sadily, *Kamus Inggris Indonesia* (Jakarta, Gramedia, 1982), h.131
- ⁶ Onong Oechiana Efendi, *Ilmu Komunikasi: Teori dan peraktek dibaca Ilmu*(Cet; VIII: Bandung: Remaja Rosda Karya 1994): h.9
- ⁷ AW. Wijaya, *Komunikasi Dalam Hubungan Masyarakat*, Selanjutnya dibaca *Hubungan* (Jakarta: Bina Aksara,1993),h. 8
- ⁸ Lihat Murthada Muthahhari, *Society and History*, diterjemahkan oleh M. Hassan dengan judul *Sejarah dan Masyaraat* (Cet. V. Bandung: Mizan, 1995), h,15
- ⁹Lihat A.W. Wijaya, *Ilmu Komunikasi Teori dan Peraktek* selanjutnya dibaca *Komunikasi* (Jakarta: Bina Saksara, 1986), h.15
- ¹⁰Lihat Onong Oechiana Efendy, *Ilmu Komunikasi Teori dan Peraktek*,h.10
- ¹¹Edwar Depari, *Komunikasi Pembangunan* (Jakarta: Bina Aksara, 1995), h. 8
- ¹²Lihat Hafied Cangara, *Pengantar Ilmu Komunikasi*(Jakarta:Raja Grafindo Persada, 1998),h. 18.
- ¹³<http://id.wikipedia.org>, diakses pada tanggal 4 Desember 2017
- ¹⁴ Elly M. Setiadi dan Usman Kolip, *Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi, dan Pemecahannya* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), h 361.
- ¹⁵Koentjaraningrat, *Pengantar Antropologi* (cet. V Jakarta: Aksara Baru, 2003).,h.:136
- ¹⁶Robert M. Z. Lawang,198,h.:89

DAFTAR PUSTAKA

- Abe, A. *Perencanaan Daerah: Memperkuat Prakarsa Rakyat dalam Otonom. Daerah*. Laper Pustaka Utama : Yogyakarta,2001.
- _____, *Ekonomi Pembangunan II (Development Economics II)* Jakarta Pusat Penerbitan Universitas Terbuka : 2004..
- _____, *Ekonomi Pembangunan I (Development Economics I)* Jakarta Pusat Penerbitan Universitas Terbuka : 2003.
- Bagong, S. *Perangkap Kemiskinan, Problem dan Strategi Pengentasan*, Erlangga University Press, Surabaya,2005
- Budiardjo, M., *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Gramedia : Jakarta,1985.
- Cohen J.M and Uphoff. *Rural Development Participation*. New York. Itacha,1980
- Conyers, D., *Perencanaan Sosial di Dunia Ketiga*. Yogyakarta: Gadjah Mada,1991
- Frank, A. G.,. “*Sosiologi Pembangunan dan Keterbelakangan Sosiologi*”. Jakarta: Yayasan Ilmu-Ilmu Sosial, 1994
- Gomes, F. C., *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Penerbit Andi.,Yogyakarta. 2003
- Handoko. T. H.,. *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*. Liberty. Yogyakarta,2003
- Hasibuan, M. S.P., *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Edisi Revisi Bumi Aksara. Jakarta,2003
- Isbandi Rukminto Adi. Revisi. *Pemberdayaan Masyarakat dan Partisipasi Masyarakat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada,2012
- Jim Ife .. *Community Development*. Yogyakarta: Pustaka Belajar,2006
- Kartasmita, G.,. *Perencanaan Pembangunan Nasional*. Universitas Brawijaya Malang, Fakultas Ilmu Administrasi : Malang,1994
- Kusumaatmadja, M., , *Konsep-konsep Hukum Dalam Pembangunan*. cetakan ke 2, Alumni : Bandung,2006
- Mangkunegara, A. P., 2000. *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya
- Maskun, S., *Pembangunan Masyarakat Desa*. Yogyakarta: PT Media Madya Mandala,1993
- Mikkelsen, Britha. *Metode Penelitian Partisipatoris dan Upaya-Upaya Pemberdayaan*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia. 2001

- Miles, B.B., dan A.M. Huberman, *Analisa Data Kualitatif*. UI Press: Jakarta, T.th.
- Munandar, *Ilmu Sosial Dasar Teori dan Konsep Ilmu Sosial*. Bandung: Eresco. 1992
- Ndraha, T., *Pengantar Teori Pembangunan Sumber Daya Manusia*. Jakarta : Rineka Cipta, 1999
- Nugroho, I dan I. Dahuri, *Pembangunan Wilayah: Perspektif Ekonomi, Sosial dan Lingkungan*. Jakarta: Penerbit PT Pustaka LP3ES, 2004
- Riyadi, D. dan S. Bratakusumah, *Perencanaan Pembangunan Daerah*. Jakarta: Rajawali :2003
- Salam, S. D., *Manajemen Pemerintahan Indonesia*. Jakarta, Penerbit : Djambatan. 2002
- Sastropoetro, S., *Partisipasi, Komunikasi, Persuasi, dan Disiplin dalam Pembangunan Nasional*. Bandung: Alumni. 1998
- Siagian, S.P., *Proses Pengelolaan Pembangunan Nasional.*, Jakarta: Penerbit CV. Haji Masagung. 1994
- Soemanto, *Metode-Metode Penelitian.* Jakarta: Gramedia 2003
- Sofyandi, H., *Manajemen Sumber Daya Manusia.* Yogyakarta: Graha Ilmu. 2008
- Suharto, E., *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, Bandung: Refika Aditama, 2005
- Sulistiyani, A. T. dan Rosidah., *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Graha Ilmu: 2003
- Sumardi, M., *Kemiskinan dan Kebutuhan Pokok*, Jakarta: CV. Rajawali 2005
- Sumarno A.P, dan T. S. Ismet, *Dasar-Dasar Komunikasi Politik*, Bandung. Alumnus Press: Bandung. 2000
- Syafiie, I., *Pengantar Ilmu Pemerintahan*, Bandung: Refika Aditama, 2007
- Tikson. D. T., *Keterbelakangan dan Ketergantungan : Teori Pembangunan Di Indonesia, Malaysia dan Thailand*. Makassar : Innawa. 2005
- Tjokrowinoto, M, *Pembangunan : Dilema dan Tantangan*. Pustaka Pelajar : Yogyakarta. ., 1996